



JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Kutacane

Financing Education at Babussalam Kutacane Tarbiyah College of Sciences Babussalam

Muhammad Irsan Barus¹⁾*, Syadidul Kahar²⁾ & Saidup Kudadiri³⁾

- 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam, Indonesia
- 3) Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al Ikhlas Sidikalang, Indonesia

Diterima: April 2019; Disetujui: Mei 2019; Dipublish: Juni 2019.

Abstrak

Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju, negara berkembang memprioritaskan anggaran daerahnya untuk pembangunan pendidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan bagi pembangunan pendidikan di negaranya. Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan data deskriptif dari informan tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan sistem pembiayaan pendidikan di STIT Babussalam Kutacane. Hasil penelitian diperoleh bahwa STITBA menerapkan Sistem Keuangan Terpusat (SKT) untuk dana yang bersumber dari Uang Pembangunan dan SPP mahasiswa sehingga istilah defisit tidak berlaku dilingkungan STITBA. Sedangkan dana yang sifatnya untuk kegiatan tertentu seperti biaya PPL, PKM, Komprehensif, Seminar Proposal, Bimbingan Skripsi, Munaqasyah, dan Wisuda dikelola oleh Bendahara sekolah tinggi sendiri dengan membuat pertanggung jawaban kepada Pimpinan STITBA. Berdasarkan hal ini maka dana yang diperoleh oleh STIT Babussalam Kutacane menggunakan model Penggalangan dana.

Kata Kunci. Pembiayaan Pendidikan, Mutu Pendidikan, Pembangunan Pendidikan.

Abstract

The relationship between government, society, and the private sector is an inseparable relationship in its role to improve equity and quality of education. Different from the education system in developed countries, developing countries prioritize their regional budgets for education development and are carried out with various financing models that are beneficial for the development of education in their country. The research approach taken in this study is a qualitative approach. This is done to reveal descriptive data from informants about what they did, felt, and what they experienced with the focus of the research. This study attempts to describe the education financing system in Babussalam Kutacane STIT. The results of the study showed that STITBA applied a Centralized Financial System (SKT) for funds sourced from Development Fees and student tuition fees so that the term deficit did not apply to the STITBA environment. While the funds are for certain activities such as PPL, PKM, Comprehensive, Proposal Seminar, Thesis Guidance, Munaqasyah, and Graduation managed by the Treasurer of his own school by making accountability to the STITBA Leader. Based on this, the funds obtained by Babussalam Kutacane STIT use the Fundraising model.

Keywords. Education Financing, Educational Quality, Educational Development.

How to Cite: Barus, M.I, Kahar, S. & Kudadiri, S. (2019). *Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam Babussalam Kutacane*. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, Vol. 11 (1): 74-83.

*Corresponding author:

E-mail: mirsanbarus@gmail.com

PENDAHULUAN

Konsep pendidikan masyarakat Indonesia saat ini menuntut untuk menjadi masyarakat yang berpendidikan yang mengacu kepada kemandirian, dalam arti dituntut untuk menguasai berbagai hal dan kemampuan yang dapat menjadikan peserta didik menjadi mandiri dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk dapat memberikan dan meningkatkan kemampuan adalah dengan bersekolah atau masuk suatu lembaga pendidikan. Namun sayangnya tidak semua masyarakat Indonesia dapat menikmati pendidikan itu karena keterbatasan kemampuan finansial. Ini merupakan masalah yang serius dalam pembangunan dunia pendidikan di Indonesia. Secara substansial, aktivitas-aktivitas pendidikan pada dasarnya tidak hanya berupa pendidikan sekolah formal saja, atau cukup dengan dan berhenti sampai pada pendidikan formal. Pendidikan formal lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan akan penguasaan pengetahuan dan kemampuan dasar. Untuk tahap selanjutnya diharapkan peserta didik dapat mandiri melanjutkan pendidikannya, karena dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan pendidikannya itu sendiri.

Menurut John Dewey dalam Alisuf (Fattah, 2006), pendidikan pada dasarnya menyatu dengan hidup, oleh karena itu pendidikan terus berlangsung sepanjang hidup sehingga pendidikan itu tidak pernah berakhir. Maksud diadakannya konsep pendidikan sepanjang hayat ialah agar setiap manusia Indonesia senantiasa terus menerus dapat belajar, mendidik dan mengembangkan dirinya, karena selain sebagai kewajiban kodrati bagi manusia juga sebagai sarana untuk peningkatan diri. Dengan demikian dalam konteks pendidikan formal untuk proses pengembangan inilah pendidikan itu perlu pembiayaan, karena setiap proses pengembangan itu perlu adanya anggaran agar proses tersebut berjalan secara

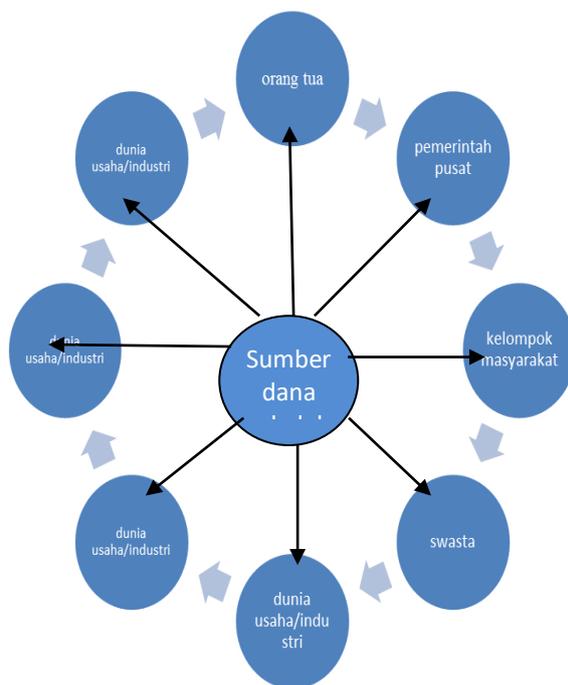
optimal sesuai dengan visi dan misi pendidikan yang sudah dicanangkan. Saat ini pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Telah diketahui bersama bahwa pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, yang apabila pendidikan itu lemah dalam hal pembiayaan, maka mutu pendidikan itu juga akan mengikut lemah. Oleh karena itulah dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan maka pendidikan itu akan berjalan dengan baik.

Pada Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan terdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang Standar Pembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62, yaitu standar pembiayaan pada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya "biaya operasi" satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup "biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal". Pada Bab IX: Standar Pembiayaan, Pasal 62 disebutkan bahwa:

- 1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal;
- 2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap;
- 3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan;
- 4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; b) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c) Di Indonesia, sumber dana pendidikan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abbas (2009) terbagi menjadi dua, yakni; a) lembaga pendidikan

yang dikelola oleh pemerintah yang berasal dari APBN, APBD dan SPP siswa serta bantuan-bantuan lain dari lembaga/donor yang tidak mengikat, b) sedangkan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sumber dananya atau sumber dana umumnya tertumpu pada masyarakat dan sumber-sumber lain dari lembaga/donor/donator yang tidak mengikat dapat berupa hibah atau bantuan dari pihak swasta dalam negeri maupun dari luar negeri.

Senada dengan hal tersebut di atas, Fattah menyebutkan bahwa sumber keuangan sekolah dapat bersumber dari orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dunia usaha/industri, dan alumni. Sumber-sumber dana untuk sekolah dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Sumber Dana Sekolah (Fattah, 2012)

Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah. Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masing

negara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi sekolah. Menganalisis biaya pendidikan sebagai modal yang produktif, dan sebagai barang modal tentu memiliki fungsi untuk produksi selanjutnya. Untuk melihat manfaatnya, maka biaya pendidikan perlu dihitung apakah mencapai *rate of return* (Mulyasa, 2009). Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakah sistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: i) menghitung berbagai proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; ii) distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat mensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Berdasarkan latar belakang di atas bahwa perlu adanya untuk mengkaji bagaimana sebenarnya pembiayaan pendidikan dan bagaimana peran pajak itu sendiri terhadap pendidikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan untuk mengungkapkan data deskriptif dari

informan tentang apa yang mereka lakukan, rasakan, dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. Penelitian ini berupaya mendiskripsikan sistem pembiayaan pendidikan di STIT Babussalam Kutacane. Penelitian kualitatif menunjuk kepada prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa ungkapan, pandangan, pemikiran dan tindakan individu-individu maupun keadaan secara holistik. Penelitian kualitatif menempatkan pokok kajiannya pada suatu organisasi atau individu seutuhnya, dan tidak direduksi kepada variabel yang telah ditata atau sebuah hipotesis yang telah direncanakan sebelumnya (Sugiyono, 2013).

Berdasarkan karakteristik penelitian kualitatif tersebut, maka pelaksanaan penelitian terkait dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan meningkatkan kualitas pendidikan guna menjadikan satuan pendidikan dapat bersaing dan unggul yang pada akhirnya menuju lembaga pendidikan yang maju, tentunya memiliki upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak sekolah sesuai fokus dalam penelitian ini yang akan dikaji secara holistik terhadap seluruh unsur-unsur terkait, bukan secara parsial.

Lokasi penelitian yang digunakan sebagai latar dalam penelitian ini adalah STIT Babussalam Kutacane. Setiap latar yang memenuhi minat substantif dan minat teoritik peneliti dapat dipilih sebagai kasus penelitian. Memang harus diakui bahwa lebih mudah mengetahui latar yang memenuhi minat substantif peneliti daripada memilih latar yang memenuhi minat teoritik. Mengacu pada minat untuk mengembangkan teori substantif dari lapangan, tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan dan dipengaruhi oleh permasalahan yang muncul maka dipilih STIT Babussalam Kutacane sebagai lokasi penelitian.

Sumber data penelitian dengan pendekatan kualitatif dilakukan dengan melakukan pengumpulan data dalam

bentuk kata-kata atau kalimat yang menggambarkan fenomena fokus penelitian yang telah disiapkan. Informan penelitian ini adalah Ketua STIT Babussalam Kutacane, wakil Ketua, dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat. Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* dan *snow ball*. Penetapan Ketua STIT Babussalam Kutacane, wakil Ketua, dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat sebagai informan dalam hal ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Kegiatan analisis data meliputi mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkatagorikan dengan tujuan menemukan temuan. Penelitian ini menggunakan dua analisis data, yaitu analisis data dalam kasus dan analisis data lintas kasus. Mengacu pada pendapat Miles dan Huberman (2009), bahwa penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya sampai pada titik jenuh. Proses penelitian ini berbentuk siklus meliputi pengumpulan data, display data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil STIT Babussalam Kutacane

Organisasi dan tata laksana di Sekolah Tinggi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990. Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998. STITBA dan pelaksanaannya diatur berdasarkan rapat Senat Sekolah Tinggi. Berdasarkan peraturan dan keputusan-keputusan di atas STIT dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Ketua I, II, dan III serta seorang sekretaris ketua yang dipilih oleh Ketua. Bidang-bidang di Sekolah Tinggi saat ini terdiri dari tiga bidang, yakni: bidang Akademik, Bidang Keuangan dan bidang kemahasiswaan.

Setiap bidang dipimpin oleh ketua bidang yang bertanggung jawab langsung terhadap ketua. Pelaksanaan aktivitas laboratorium-laboratorium dipimpin oleh seorang ketua laboratorium yang bertanggung jawab langsung ke ketua jurusan.

Sistem tata pamong di Sekolah Tinggi telah diatur dalam berbagai peraturan ketua Yayasan dan peraturan yang dikeluarkan oleh ketua STITBA meliputi statuta Sekolah Tinggi, peraturan pegawai, peraturan disiplin pegawai, peraturan ketua STITBA tentang etika pergaulan mahasiswa, peraturan tata tertib dosen dan mahasiswa dan lain sebagainya. Berbagai aturan tersebut berisi tentang struktur organisasi dan tugas serta fungsinya yang harus menjadi pedoman kerja maupun perilaku bagi civitas akademika sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, sehingga menciptakan sistem tata pamong yang kredibel, transparan dan bertanggung jawab dan adil. Berbagai aturan tersebut disosialisasikan harus dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika dan di dalam

pelaksanaannya dilakukan pemantauan atau supervisi di masing-masing unit serta dievaluasi secara kontinu melalui rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dan rapat-rapat di jurusan/prodi.

STITBA Kutacane merupakan satu unit pelaksana pendidikan tinggi agama Islam di bawah jajaran KOPERTAIS Wilayah-V (lima) Banda Aceh dengan mengelola 2 (dua) jurusan/prodi S.1 yaitu; S.1 Manajemen Pendidikan Islam (MPI) SK.No. DJ.I/380/2013, S.1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) SK.No.DJ.I/2013/2016. Di samping itu dilengkapi dengan berbagai sarana dan unit-unit pelaksana teknis, seperti Unit Perpustakaan, Unit Komputer, dan lembaga-lembaga pusat strategis dan organisasi-organisasi kemahasiswaan lainnya.

Sumber Dana STIT Babussalam Kutacane

Adapun sumber dana pembiayaan pendidikan STIT Babussalam Kutacane adalah sebagai berikut:

| No. | Nama Instansi | Jenis Kegiatan | Manfaat yang Telah Diperoleh |
|-----|--|---------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (6) |
| 1 | SPP Mahasiswa dan Biaya Operasional dari mahasiswa | Operasional Kampus | Terselenggaranya tri darma perguruan tinggi |
| 1 | PEMDA Aceh | Bantuan DBO | Dibantunya biaya DBO |
| 3 | Pemda Aceh Tenggara | Bantuan Operasional | Bantuan Operasional STITBA |
| 4 | MPU | Pembinaan dosen yang berwawasan ulama | Adanya beberapa dosen yang tergabung dalam Organisasi MPU |
| 6 | Kemenag | Bantuan Pendidikan | Banyak bantuan yang diperoleh, seperti beasiswa, buku pustaka dan bantuan lab. Lainnya. |
| 7 | Baitul Mal | Bantuan Pendidikan | Adanya bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu |
| 8 | BRI | Pembayaran SPP dan bantuan pendidikan | Beasiswa dan Mempermudah Penyetoran SPP |
| 9 | Dikjar Aceh Tenggara | Bantuan Pendidikan | Bantuan Biaya Pendidikan |
| 10 | Kopertais V Aceh | Bantuan Pendidikan | Bantuan Biaya Pendidikan |

Dana yang diperoleh tersebut direalisasikan sebagai berikut:

| No. | Jenis Penggunaan |
|-----|------------------------------|
| 1 | Pendidikan |
| 2 | Penelitian |
| 3 | Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 4 | Investasi prasarana |
| 5 | Investasi sarana |
| 6 | Investasi SDM |
| 7 | Gaji Pegawai |
| 8 | Gaji Dosen |
| 9 | Pembangunan Kampus |
| 7 | Lain-lain |

Sistem Pembiayaan STIT Babussalam Kutacane

STITBA menerapkan Sistem Keuangan Terpusat (SKT) untuk dana yang bersumber dari Uang Pembangunan dan SPP mahasiswa sehingga istilah defisit tidak berlaku dilingkungan STITBA. Sedangkan dana yang sifatnya untuk kegiatan tertentu seperti biaya PPL, PKM, Komprehensif, Seminar Proposal, Bimbingan Skripsi, Munaqasyah, dan Wisuda dikelola oleh Bendahara sekolah tinggi sendiri dengan membuat pertanggungjawaban kepada Pimpinan STITBA.

Sumber penerimaan memiliki tingkat keberlanjutan yang cukup memadai, karena pihak STITBA selalu mencapai berbagai sumber dana dari donatur di samping dana rutin SPP mahasiswa, bantuan PEMDA AcehTenggara, bantuan PEMDA Propinsi NAD, dan dari sumber lain dari pemerintah yang menaungi perguruan tinggi. Dana untuk aktifitas-aktifitas pendidikan di Jurusan MPI diperoleh dari berbagai sumber, yaitu Depag, Pemda, biaya SPP dari program S1 reguler, dan biaya-biaya analisis dari beberapa laboratorium. Dua sumber pertama dari pendapatan di atas merupakan kebijakan pemerintah dan STITBA. Pendapatan-pendapatan lain, seperti, hibah-hibah penelitian yang kompetitif, ditangani langsung oleh koordinator proyek, pendapatan ini tidak cukup untuk mendanai operasional

keseluruhan Jurusan, seperti pemeliharaan, pembelian alat-alat laboratorium, inter/intranet.

Alokasi dana untuk operasional Prodi MPI dan PGMI dikelola oleh STITBA. Prodi hanya mengajukan usulan anggaran melalui rapat kerja (Raker) prodi untuk keperluan administrasi dan kebutuhan lainnya. Bila usulan disetujui, kemudian sekolah tinggi memberikan dana kepada prodi. Keseluruhan anggaran dikelola oleh Wakil Ketua Bidang Keuangan (WK-II). Oleh karenanya, data pendapatan dan pengeluaran prodi yang sesungguhnya tidak dikelola di prodi, tetapi hanya disampaikan berupa rekapitulasi. Namun demikian, data estimasi dapat dibuat berdasarkan jumlah mahasiswa yang terdaftar dan jenis pengeluaran rutin untuk keperluan pengajaran. Perolehan dana dalam setiap tahunnya masih dirasakan kurang memadai, terutama dalam bidang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, serta honor dosen dan karyawan masih perlu dipertimbangkan, minimal sesuai standar upah minimum propinsi. Kendala yang dihadapi STITBA adalah bahwa mahasiswa yang kuliah di STITBA adalah mahasiswa yang taraf ekonomi orang tuanya masih menengah ke bawah.

Dampak dari masih kurangnya pemenuhan pembiayaan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi adalah tidak tercapainya secara penuh dari tujuan yang telah ditetapkan. Di antaranya seperti dalam pendidikan dan pengajaran, dosen masih mencari keuangan dari sumber lain sehingga terkadang dosen tidak tercapai seratus persen hadir mengajar atau kadang terlambat. Dampak lainnya adalah pada penelitian, dalam konteks ini anggaran untuk penelitian dari kampus masih minim sehingga dosen agak kewalahan dalam melakukan penelitian sehingga dosen masih jarang melakukannya. Sedangkan anggaran penelitian dari pemerintah sudah ada, karena adanya persaingan dan

persyaratan yang masih belum terpenuhi dosen masih sedikit dosen yang mendapatkannya.

Pengeluaran yang ada di STITBA adalah untuk pembiayaan operasional rutin, kegiatan, insidental, penyelenggaraan kegiatan ilmiah yang tidak rutin (seminar, Diskusi, kuliah umum (tamu), rapat kerja, dan lain-lain) pengembangan prasarana/sarana, serta dana bantuan ke pihak lain yang membutuhkan. Struktur pengeluaran STITBA pada umumnya dikendalikan oleh sekolah melalui bagian keuangan. pengeluaran-pengeluaran tersebut meliputi gaji dosen/karyawan, honor bimbingan/ujian Skripsi, honor panitia, honor KKN/PPL, dana penelitian serta dana pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan pengeluaran yang terkait dengan pengembangan program STITBA yang terbatas disediakan melalui dana subsidi dari Yayasan yang dikelola oleh Bendahara STITBA.

Dana penelitian yang disediakan Sekolah Tinggi baik untuk mahasiswa maupun dosen masih dinilai minim, namun demikian hal ini sudah membuktikan bahwa minat dosen dalam melakukan penelitian dalam setiap tahunnya meningkat. Bahkan ada dosen yang melakukan penelitian dengan swadaya sendiri, tanpa bantuan dari pemerintah dan sekolah tinggi. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan penelitian adalah kurangnya dana yang disediakan pemerintah untuk jatah perguruan tinggi swasta, bahkan sekalipun ada hal itu harus melalui hibah bersaing dan hibah kompetitif dimana jumlah pesertanya adalah seluruh dosen yang ada di Indonesia melalui lembaga penelitian Pendis Kemenag.

Sesuai dengan visi dan misi Sekolah tinggi bahwa pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi masih minim, baik dan bentuk karya maupun jumlah dana yang dianggarkan, namun sekolah tinggi dengan

segala keterbatasannya telah mampu merebut jantung hati masyarakat setempat melalui baksos mahasiswa dan dosen serta safari Ramadhan yang dilakukan dalam setiap bulan suci Ramadhan. Dari hasil pengabdian ini, nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Babussalam semakin dikenal oleh masyarakat secara luas. Minimnya anggaran pengabdian masyarakat ini disebabkan karena bentuk pengabdian yang dilakukan selama ini hanya dalam bentuk kerja bakti atau kegiatan yang sifatnya membantu masyarakat. Sedangkan dalam bentuk tulisan dan pemikiran yang dituangkan secara tertulis masih sedikit. Kendala ini disebabkan oleh kurangnya minat dosen dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat secara tertulis dalam bentuk karya.

Sistem Pembiayaan Pendidikan Tinggi STIT Babussalam Kutacane

Berdasarkan Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa manajemen memiliki tiga tahapan penting yang jika di terapkan dalam pengelolaan keuangan akan ditemukan sinkronisasi, yaitu :

Perencanaan, yaitu penyusunan anggaran (*budgeting*). Penganggaran merupakan proses kegiatan atau proses penyusunan anggaran (*budget*). Budget ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu.

Anggaran program (Program *budget system*). Bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Anggaran program dihitung berdasarkan jenis program. Sebagai bahan perbandingan kalau dalam anggaran butir per butir disebutkan gaji dosen, sedangkan dalam anggaran program disebut gaji untuk perencanaan pengajaran sebagai salah satu komponen dan menyangkut semua kaitannya dengan pelajaran.

Anggaran berdasarkan kinerja (*Performance-based budget*). Bentuk ini

sesuai namanya menekankan kinerja (*performance*) dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Anggaran berdasarkan hasil ini merupakan alat manajemen yang dapat mengidentifikasi secara jelas satuan dari hasil suatu program dan sekaligus merinci butir per butir dari kegiatan yang harus dibiayai.

Dari perspektif sejarah, lembaga-lembaga pendidikan Islam khususnya madrasah dan pesantren itu tumbuh dari bawah, dari gagasan tokoh-tokoh agama setempat. Diawali dari pengajian yang lantas mendirikan mushalla/masjid, madrasah diniyah, dan kemudian mendirikan pesantren atau madrasah. Sebagian besar tumbuh dan berkembang dari kecil dan kondisinya serba terbatas. Selanjutnya ada yang tumbuh dan berkembang dengan pesat atau mengalami *continuous quality improvement*, ada juga yang *stagnant* (jalan di tempat) dan ada pula yang mati. Bagi yang terus berkembang hingga mampu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan umum dan perguruan tinggi, didukung oleh usaha-usaha lain yang bersifat profit seperti pertanian, perdagangan, percetakan, industri jasa dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari model pembiayaan pendidikan menurut John S Mrophet (1975) bahwa model pendidikan dibagi menjadi 5 model, yaitu:

Flat Grant Model, yaitu menggunakan sistem distribusi dana. Semua distrik atau kabupaten/kota menerima jumlah dana yang sama untuk setiap muridnya tidak memperlihatkan perbedaan kemampuan daerah.

Equalization Model yaitu bertitik tolak pada *ability to pay* (kemampuan membayar) masyarakat. Masyarakat yang miskin tentu perlu menerima bantuan dana lebih serius dibanding dengan masyarakat yang *income-nya* lebih tinggi.

Complete State Model, yaitu satu-satunya rencana pembiayaan pendidikan yang dirancang untuk menghapus semua perbedaan lokal, baik dalam pembelanjaan maupun dalam pemerolehan pajak tidak akan

ada pajak *property* sekolah lokal dengan berbagai taraf dan basis pajak lokal adalah *unequal* (tidak seimbang).

Foundation Plan, yaitu dirancang untuk menggali empat masalah besar dalam pendidikan dan keuangan, yaitu: kesetaraan pembelanjaan, penetapan-penetapan standar pajak dan pembelanjaan sekolah minimum, pemisahan (*demarkasi*) wewenang politik antara distrik distrik sekolah lokal dengan negara bagian, dan provinsi untuk perbaikan berkesinambungan atas proses pendidikan.

Cara kerja *foundation plan* adalah, *pertama*, negara harus menentukan biaya per siswa per tahun bagi program pendidikan yang memuaskan. *Kedua*, negara harus mematok tarif pajak minimum yang harus diberlakukan oleh semua distrik sekolah. *Ketiga*, Negara memberikan hibah (*grants*) kepada tiap distrik sekolah dengan jumlah yang sama. Sedangkan besarnya bantuan adalah situasional terhadap kekayaan lokal tetapi tidak pada upaya pajak. *Foundation plan* membagi kue dengan porsi yang sama, namun distrik-distrik miskin lebih diutamakan

Berdasarkan analisis terhadap uraian di atas maka konsep pembiayaan pendidikan yang dilakukan oleh STIT Babussalam Kutacane agaknya sulit merujuk kepada salah satu model. Karena masing-masing elemen seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Ada baiknya beberapa model di atas akan dapat dimodifikasi menjadi sebuah model yang ideal untuk disesuaikan dengan *setting* area pendidikan ataupun *setting* sosial budaya daerah. Di sisi lain pihak kampus juga melakukan sistem penggalangan dana (*Fundraising*). Hal ini sejalan dengan pendapat Martin bahwa fundraising adalah keseluruhan biaya yang berasal dari masyarakat, orang tua dan pemerintah (Martin, 2014). Jadi pihak Yayasan melakukan manajemen yang dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Ini berarti bahwa

lembaga pendidikan Islam adalah lembaga milik masyarakat, atau bisa dikatakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Manajemen pendidikan Islam yang tepat adalah manajemen yang dapat mendekatkan pendidikan Islam dengan masyarakat, diterima, dimiliki dan dibanggakan oleh masyarakat, dan dapat mendayagunakan potensi-potensi yang dimiliki masyarakatnya.

Semangat beramal untuk membangun lembaga pendidikan dalam tradisi iman umat Islam sebenarnya bukan sesuatu yang baru, bahkan umat Islam pernah menjadi pelopor (*avant-garde*) dalam komitmennya mengembangkan lembaga pendidikan melalui semangat amal. Yang menjadi persoalan sekarang adalah, bagaimana membangkitkan kembali semangat beramal ini dalam mengembangkan pendidikan Islam. Pertama, adanya lembaga semacam *Board of Trustees* yang anggotanya dari wakil masyarakat yang memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan Islam. Kedua, perlu dibangkitkan kembali semangat juang (jihad), etos kerja semua komponen stake holder internal sebagai wujud amal (perbuatan) nyata. Ketiga, perlu diterapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) dalam penyelenggaraan pendidikan Islam.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi, (1) prosedur anggaran; (2) prosedur akuntansi keuangan; (3) pembelajaran, pergudangan, dan prosedur pendistribusian; (4) prosedur investasi, dan (5) prosedur pemeriksaan (Fattah: 2006). Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan ini menganut asas pemisahan tugas antara fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Di atas sudah dijelaskan bahwa otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan dan pengeluaran anggaran donatur adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan

pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.

Finansial lembaga pendidikan tinggi di STIT Babussalam Kutacane mengacu pada proses dimana pendapatan dan sumber-sumber lain yang diperoleh digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi, juga proses dimana sumber-sumber tersebut dialokasikan. Secara umum pengertian pengelolaan keuangan (*financial management*) adalah segala aktifitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Sehingga dalam kaitanya dengan pendidikan *financial management* merupakan hal yang primer yang harus dijalankan sehingga lembaga pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan uraian dari penjelasan di atas, maka ada beberapa ide yang digagas untuk sistem finansial pendidikan tinggi Islam adalah:

Sebaiknya badan usaha Islam, dan badan keuangan Islam baik wakaf, zakat, baitul mal menyusun konsep bagaimana mendanai pendidikan, baik itu beasiswa, pembangunan gedung dan hal lain yang mendukung pendidikan sehingga pendidikan Islam berjalan dengan lancar. Karena permasalahan pendidikan Islam sekarang adalah tentang lemahnya pendidikan di bidang dana.

Pendidikan Tinggi Islam sebaiknya membuat sebuah organisasi agar saling membantu dan memantau sekolah lainnya yang membutuhkan bantuan. Sehingga dalam penggalangan dana akan terarah dan tidak ada kesenjangan terhadap pendidikan islam.

Untuk mencapai *rate of return* pada suatu pemerintahan di daerah harus mencetak sumber daya manusia (SDM)

yang berpendidikan yang dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan Islam merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak bisa melepaskan diri dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Di sinilah peran pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan negara, termasuk membiayai pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan sehingga dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meratakan dan meningkatkan pendapatan anggota masyarakat. Sumber utama biaya pendidikan tinggi dari pajak yang dimasukkan dalam bentuk APBN dan APBD. Bentuk pajak yang diperuntukan untuk membiayai pendidikan antara lain pajak kekayaan, pajak penghasilan perorangan, pajak pendapatan penjualan, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya.

SIMPULAN

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak bisa melepaskan diri dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Berbeda dari sistem pendidikan di negara maju, negara berkembang memprioritaskan anggaran daerahnya untuk pembangunan pendidikan dan dilakukan dengan berbagai model pembiayaan yang menguntungkan bagi pembangunan pendidikan di negaranya. Masing-masing elemen seperti pemerintah pusat,

pemerintah daerah, orang tua murid, dan masyarakat secara ideal harus memberi biaya untuk pendidikan. Ada baiknya beberapa model pembiayaan pendidikan akan dapat dimodifikasi menjadi sebuah model yang ideal untuk disesuaikan dengan *setting* area pendidikan ataupun *setting* sosial budaya daerah. Di sisi lain pihak STIT Babussalam Kutacane juga melakukan sistem penggalangan dana (*Fundraising*). Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, pemerintah tidak bisa melepaskan diri dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan. Di sinilah peran pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan negara, termasuk membiayai pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan sehingga dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang pada akhirnya akan dapat meratakan dan meningkatkan pendapatan anggota masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Manajemen Perguruan Tinggi; Beberapa Catatan Cet. II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fattah, N. (2012). *Standar Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Fattah, N. (2006). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cetakan Keempat.
- Johns, L.R. & L.F. Morphet. (1975), *The Economics and Financing of Education: A System Approach*, New Jersey: Prentice-Hall Englewood Cliffs.
- Martin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.